

Segmentasi Politik Pemilih Pasangan Pemenang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Padang Tahun 2008

Oleh: Nora Eka Putri

ABSTRACT

On the slope of Local Government Election of Padang in 2008 there were five pairs of mayor and deputy mayor candidates, among other candidates was Fauzi Bahar and Mahyeldi (Coalition PAN and PKS) that gets the most votes in the election of regional head and deputy regional head of Padang. Efforts were made could not be separated from political parties or candidates foresight in carrying the work program as well as segmentation of the electorate. The study examines the political segmentation of the voters for election winner slope of Padang Local Government on the aspects of policy-oriented problem-solving and ideological orientation. The finding of this study indicated that policy-oriented problem-solving that involved mass media in electoral politics segmentation of Fauzi Bahar-Mahyeldi voters is not too significant. Furthermore, economic performance and political responsibilities were more emphasized on the process of imaging and "selling" the performance of the incumbent. Ideological orientation of political segmentation of voters for the election winner is very important for the election because it has cadre of investigators with a high loyalty.

Kata Kunci: *Segmentasi politik, pemilih, orientasi policy-problem-solving, orientasi ideologis*

I. PENDAHULUAN

Parameter paling valid dalam melihat ada atau tidaknya pembangunan politik di sebuah negara adalah demokrasi. Dengan demokrasi berarti pemerintah memperlakukan rakyat sebagai subjek bukan objek pembangunan, sehingga pemerintah merasa perlu membuka kran partisipasi dari masyarakat¹ (Duroduddin Mashad, 2004). Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam negara demokrasi adalah partisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilu

merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya terhadap kebijakan pemerintah. Pemilu adalah proses demokrasi yang diselenggarakan oleh Negara yang menganut paham demokrasi dengan memberikan suara sebagai bentuk partisipasi dan wujud aspirasi melalui partai politik sebagai peserta dalam Pemilu (diatur dalam UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD). Sedangkan di tingkat daerah, masyarakat juga dapat menyelenggarakan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

¹ Duroduddin Mashad. 2004. *Andai Aku Jadi Presiden*. Jakarta: Khalifa

Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai ekspektasi masyarakat lokal terhadap kepemimpinan yang representatif terhadap kepentingan publik, juga sesuai dengan esensi dari otonomi daerah yang digulirkan oleh pemerintah – pelaksanaan otonomi daerah khususnya dari aspek politik; penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan masyarakat, pengambilan keputusan yang taat asas pertanggungjawaban publik, sistem manajemen pemerintahan yang efektif², idealnya akan mewujudkan pemerintahan daerah yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, sebab output dari demokratisasi adalah terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat.

Di Sumatera Barat Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sejak tahun 2005 telah dilaksanakan sebanyak dua puluh (20) kali dan terakhir Oktober 2008 Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Padang. Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Padang mengacu pada ketentuan UU No 12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah pada pasal 56 ayat 2 yaitu “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Sehingga pada pelaksanaan Pemilu tersebut terdapat pasangan calon kepala daerah

dan wakil kepala daerah dari perseorangan – tidak diusung oleh partai politik. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari perseorangan dinilai sebagai harapan baru dan alternatif pilihan masyarakat yang tidak dipengaruhi oleh kepentingan partai politik bagi perbaikan pembangunan masyarakat ke depan dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu menjadi lebih baik .

Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa rekapitulasi hasil penghitungan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Padang menunjukkan partisipasi pemilih Pemilu di Kota Padang adalah 57,15%. Dibandingkan dengan hasil Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah lain di Sumatera Barat, persentase hasil tersebut jauh di bawah persentase hasil Pemilu daerah lain. Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Padang Tahun 2008 terdapat lima pasangan calon, 3 pasangan calon di antaranya berasal dari calon perseorangan dan 2 pasangan calon berasal dari partai politik, antara lain pasangan calon Fauzi Bahar dan Mahyeldi (Koalisi PAN dan PKS) yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Padang.

Dalam era demokratisasi hubungan antara partai politik atau kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan pemilih adalah hubungan yang relatif tidak stabil karena kecenderungannya adalah ketika partai politik atau kandidat kepala daerah membutuhkan suara dari pemilih sehingga pemilih hanya

² Syauckani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

dijadikan sebagai objek politik³. Padahal keberadaan pemilih seharusnya dijadikan sebagai subjek dan partai politik sebagai pelayan dan agen pembaharuan dalam masyarakat. Namun di sisi lain pemilih juga kerap kali memindah-mindahkan dukungan mereka dari satu partai ke partai lain atau dari satu kandidat kepada kandidat lainnya disebabkan pemilih semakin kritis dan rasional dan selalu mengevaluasi apa yang telah dilakukan oleh partai-partai politik atau kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurut Firmansyah⁴ segmentasi perlu dilakukan untuk memudahkan partai politik (atau juga kandidat calon kepala daerah) dalam menganalisis perilaku masyarakat, mengingat masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki latar belakang dan karakteristik berbeda. Ketidaksiuaian metode pendekatan dan komunikasi yang dilakukan oleh partai politik atau kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan apa yang diharapkan suatu segmen pemilih akan membuat pesan politik tidak dapat dikomunikasikan dengan baik. Selain itu segmentasi politik juga bertujuan untuk menyusun program kerja kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah terutama dalam berkomunikasi dan membangun interaksi dengan masyarakat, sebab tanpa segmentasi politik kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah akan kesulitan dalam

penyusunan pesan politik, program kerja, kampanye politik dan produk politik.

Dengan mengimplementasikan segmentasi, berarti kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menggunakan pendekatan berbasis informasi yang akan menghimpun semua masukan dan isu yang berkembang dalam masyarakat terkait dengan perbaikan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu berdasarkan hasil pelaksanaan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Padang Tahun 2008, yang dimenangkan oleh pasangan Fauzi Bahar dan Mahyeldi (Koalisi PAN dan PKS), perlu dianalisis segmentasi politik pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dengan merujuk kepada metode segmentasi sebab akibat masyarakat dalam pengambilan keputusan (perilaku memilih).

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Segmentasi Politik

Segmentasi banyak digunakan dalam domain marketing. Konsep segmentasi pertama kali dikemukakan oleh Smith⁵, yaitu aktivitas yang terdiri atas tiga asumsi: konsumen terdiri dari komponen-komponen yang tidak sama atau heterogen, kedua heterogenitas konsumen ini akan mempengaruhi tingkat dan jenis permintaan konsumen, ketiga masing-masing segmen pasar dapat dipisahkan satu dengan lain dan juga dapat dibedakan dengan karakteristik pasar secara keseluruhan.

³ Firmanzah. 2008. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁴ Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

⁵ Dalam Firmanzah. 2008. *Op cit*.

Segmentasi politik juga merujuk kepada definisi di atas, sehingga menurut Fransisco⁶, segmentasi merupakan aktivitas seperti deteksi, evaluasi dan pemilihan kelompok yang memiliki karakteristik sehingga memungkinkan untuk mendisain suatu strategi yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Segmentasi politik diperlukan untuk penyusunan pesan politik, program kerja, kampanye politik, sosialisasi dan produk politik. Segmentasi politik

yang dilakukan oleh partai politik maupun kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah menggunakan pendekatan politik berbasis informasi. Partai politik atau kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah mencari, menyerap, dan mengolah informasi tentang kondisi yang ada dalam masyarakat. Jenis-jenis metode segmentasi pemilih menurut Firmanzah (diadopsi dari: Kollat; Dalrymple & Parson; Cui dan Liu) dapat dilihat dalam tabel 1 berikut:

Tabel 1: Jenis Metode Segmentasi Politik Pemilih

Dasar Segmentasi	Detail Penjelasan
Geografi	Masyarakat dapat disegmentasi berdasarkan geografis dan kepadatan populasi. Misalnya produk dan jasa yang dibutuhkan oleh orang yang tinggal di pedesaan akan berbeda dengan produk politik yang dibutuhkan oleh orang perkotaan. Begitu juga antara pgunungan dengan pesisir, masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lain
Demografi	Konsumen politik dapat dibedakan berdasarkan umur, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan dan kelas social. Masing-masing kategori memiliki karakteristik yang berbeda tentang isu politik satu dengan yang lain. Sehingga perlu dikelompokkan berdasarkan demografi
Psychografi	Psychografi memberikan tambahan metode segmentasi berdasarkan kebiasaan, <i>life style</i> , dan perilaku yang mungkin terkait dalam isu-isu politik
Perilaku (Behaviour)	Masyarakat dapat dikelompokkan dan dibedakan berdasarkan proses pengambilan keputusan, intensitas ketertarikan dan keterlibatan dengan isu politik, loyalitas, dan perhatian terhadap permasalahan politik. Masing-masing kelompok memiliki perilaku yang berbeda-beda, sehingga perlu untuk diidentifikasi
Sosial Budaya	Pengelompokan masyarakat dapat dilakukan melalui karakteristik social dan budaya. Klasifikasi seperti budaya, etnik, suku, dan ritual spesifik seringkali membedakan intensitas, kepentingan dan perilaku terhadap isu-isu politik
Sebab Akibat	Selain metode segmentasi yang bersifat statis, metode ini mengelompokkan masyarakat berdasarkan perilaku yang muncul dari isu-isu politik. Sebab akibat ini melandaskan metode pengelompokan berdasarkan pemilih rasional, tradisional, kritis dan pemilih mendua

⁶ *Ibid*

Dalam penelitian ini, segmentasi politik pemilih dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merujuk kepada teknik dan metode sebab akibat. Dalam metode segmentasi tersebut diasumsikan bahwa pemilih relatif lebih terbuka dan memahami bahwa persoalan politik dalam hal ini adalah kecenderungan perilaku memilih tidak hanya didasarkan kepada hal-hal yang bersifat statis, namun menganalisis bahwa persoalan partisipasi politik dalam hal *voting*, juga mengkaji hal yang bersifat rasional dan *concern* terhadap isu dan persoalan politik kontemporer yang terkait dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Metode segmentasi politik sebab akibat dapat dilihat dari orientasi dalam pemecahan persoalan kebijakan dan ideology oleh pemilih.

Orientasi Policy-Problem-Solving

Menurut Fiorina serta Enelow dan Hinich⁷ pemilih menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap partai politik atau kandidat dalam menawarkan solusi sebuah permasalahan. Solusi yang ditawarkan harus memiliki kekuatan argumentatif dan didukung oleh data-data yang akurat. *Policy-problem-solving* sebagai faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memberikan keputusan politik dipengaruhi oleh:

1. Media Massa

Terkait dengan media massa dikemukakan oleh Iyengar dan Kinder, bahwa peran media massa dalam membentuk opini tentang suatu isu sangat penting. Mereka harus

menggandeng media massa untuk membantu mempromosikan ide dan gagasan tentang pemecahan masalah yang akan ditawarkan kepada masyarakat

2. Kinerja Ekonomi dan Tanggung jawab Politik

Kinerja dan tanggungjawab partai politik atau kandidat secara bersamaan mempengaruhi hasil Pemilu. Persoalan ekonomi erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, misalnya persoalan pengangguran, inflasi, pajak, dan lain-lain. Selanjutnya tanggungjawab politik diartikan sebagai kontribusi partai politik atau kandidat terhadap bangsa dan negara, misalnya kepedulian terhadap nasib rakyat.

3. Penilaian tentang Policy-problem-solving (ex-post dan ex-ante)

Penilaian *ex-post* yaitu menilai apa saja yang telah dilakukan oleh partai politik atau penguasa untuk memperbaiki kondisi yang ada. Sementara *ex-ante* yaitu mengukur dan menilai kemungkinan program kerja dan solusi yang ditawarkan sebuah partai ketika diterapkan untuk memecahkan sebuah persoalan.

4. Position (Posisi)

Position mengacu kepada sejauh mana pemilih menilai kedekatan pendapatnya dengan kebijakan yang akan dilakukan atau ditawarkan oleh seorang kandidat atau partai politik.

Orientasi Ideologi

Gering⁸ mengatakan bahwa ideologi sebagai identitas yang menyatukan

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

golongan dan sekaligus sebagai pembeda dengan kelompok dan golongan lain. Ideologi melingkupi sebuah system nilai, keyakinan, symbol, mitos, ritual dan jargon yang terdapat dalam suatu struktur social masyarakat. Dalam politik hubungan antara ideology dengan politik adalah hubungan yang tidak terpisahkan, bahwa partai politik menyiratkan suatu cara berpikir yang mewarnai dan mempengaruhi cara bersikap dan berperilaku yang diperlihatkan orang-orang dalam suatu kelompok sosial.

Karl Menheim⁹ mengatakan bahwa ideologi adalah seperangkat keyakinan yang menyaring massa informasi yang diterima; ideologi memungkinkan kita mengetahui pandangan terbatas tentang sesuatu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan suatu system nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu.

Diantara aspek yang harus diperhatikan dalam orientasi ideologi dalam segmentasi politik pemilih adalah:

1. Metode dan Tujuan Akhir

Antara satu ideologi dengan ideologi yang lain memiliki cara dan tujuan akhir yang berbeda. Misalnya ideologi sosialis lebih menekankan pada aspek pemerataan dan intervensi negara, sementara ideologi kapitalis menekankan aspek kebebasan dan tidak ada intervensi negara terhadap aktivitas ekonomi, atau ideologi agama yang

dipakai dalam memahami negara seperti ideologi Islam.

2. Struktur Ideologi-spatial

Menurut Gidengil et al (Firmanzah, 2008) struktur ideologi pemilih sangat menentukan partai atau kandidat seperti apa yang menurut mereka akan menyuarakan mereka. Jadi hal tersebut dapat dipengaruhi oleh system partai disuatu negara kemudian juga kedekatan ideologi antara pemilih dengan partai politik atau kandidat — pemilih telah memiliki sistem serta keyakinan yang sudah tertanam.

3. Efek Komunikasi

Ideologi bukanlah sesuatu yang baku. Breen mengemukakan bahwa sistem nilai bisa berubah dalam perjalanan dan pengalaman hidup seorang manusia. Terdapat dialektika antara ideologi pemilih dengan partai politik atau kandidat. Hal tersebut tidak terlepas dari efek komunikasi¹⁰. Partai politik atau kandidat menggunakan strategi mobilisasi massa, media yang berimplikasi memperkuat identitas massa melalui ritual politik simbolik dan memperluas identitas ideologi partai kepada massa mengambang dan partisan partai lain.

IV. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan teknik *purposive sampling*, yaitu ketua dan sekretaris (pengurus) DPD PAN Kota Padang dan DPD PKS

⁹ Lyman Tower Sargent. 1987. Ideologi-ideologi Politik Kontemporer Sebuah Analisis Komparatif. Jakarta: Erlangga.

¹⁰ Dalam Firmanzah. 2008. *Op cit*.

Kota Padang serta seluruh tim sukses dalam Pemilu Kada Kota Padang 2008. Penelitian dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi selanjutnya triangulasi data kepada pemilih pada Pemilu Kada Kota Padang Tahun 2008 juga media massa yang ada di Kota Padang.

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Segmentasi Politik

Sebelum membahas tentang segmentasi politik pemilih dalam Pemilu Kada Kota Padang Tahun 2008, penulis akan menguraikan proses partai politik (PKS dan PAN) di dalam menetapkan kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di dalam Pemilu Kada Kota Padang, terdapat lima pasang calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri dari tiga pasang calon diusung secara perseorangan dan dua pasang calon diusung oleh partai politik—salah satu di antaranya adalah pasangan calon yang diusung oleh PKS dan PAN.

Berdasarkan keterangan dari ketua DPD PKS, PKS sebagai partai politik yang memperoleh suara terbanyak hasil Pemilu legislatif DPRD Kota Padang tetap melaksanakan visi misi dan program kerja PKS secara konsisten, termasuk mengusung calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Padang dari PKS. Dalam mencalonkan kepala daerah dan wakil kepala daerah DPD PKS Kota Padang juga melakukan tahap penyeleksian kader secara selektif dan penyaringan kader PKS sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah melewati beberapa tahapan. Mekanisme pencalonan

tersebut dimulai dari pelaksanaan Pemilu raya internal di dalam tubuh PKS yaitu mengusung calon dari PKS dengan melibatkan seluruh kader dan struktur organisasi PKS di Kota Padang yang diwakili oleh wakil kader tersebut. Dalam implementasinya kader PKS Kota Padang diwakili oleh 500 orang kader yang berperan sebagai simpul dari 6000 kader PKS di seluruh Kota Padang. Proses Pemilu raya internal telah diatur di dalam AD/ART PKS, dan muara dari Pemilu internal itu adalah terpilihnya 3 orang calon yang salah satunya ditetapkan oleh DPP sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dari PKS.

Pencalonan Mahyeldi sebagai calon wakil walikota Padang dari PKS adalah melalui tahapan Pemilu raya internal, dan terhadap posisi Mahyeldi yang sebelumnya adalah wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat kemudian diamanahi sebagai calon wakil walikota Padang tahun 2008 dinilai berbeda oleh berbagai kalangan. Khusus PKS menyatakan bahwa sikap seperti itu adalah representasi dari keputusan PKS dan bentuk pengabdian kader terhadap partai, karena lebih lanjut dijelaskan bahwa kader yang bergabung dengan PKS adalah kader yang siap dengan semua amanah yang diamanatkan kepada setiap kader termasuk dalam penempatan kader pada berbagai posisi jabatan publik (anggota legislatif atau kepala daerah dan wakil kepala daerah). Sementara itu masyarakat umum dan pengamat politik dan social budaya di Kota Padang menilai hal tersebut sebagai bentuk pengingkaran amanah terhadap konstituen atau tanggungjawab yang sudah diemban sebagai anggota

legislative yang belum diselesaikan. Selanjutnya akan dikaji tentang faktor yang mempengaruhi segmentasi politik pemilih dalam Pemilu Kada, yang dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Orientasi Policy-Problem-Solving

Pemilih menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap partai politik atau kandidat dalam menawarkan solusi sebuah permasalahan. Ketertarikan yang tinggi dari pemilih terhadap partai politik sebenarnya harus dimulai dari paradigma dan cara pandang yang substansial terhadap peran partai politik bagi masyarakat. Selama ini kecenderungan asumsi masyarakat bahwa partai politik hanya menjadikan masyarakat umum sebagai komoditas dalam Pemilu — suara pemilih, namun setelah keinginan partai politik terwujud (mendapatkan dukungan mayoritas), janji-janji politik yang disampaikan sewaktu kampanye politik tidak lagi diindahkan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dari waktu ke waktu semakin menurun.

Oleh sebab itu partai politik harus mengubah paradigm hubungan antara pemilih dengan partai politik. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian penting partai terhadap pemilih sebelum nantinya mengkaji faktor yang mempengaruhi segmentasi politik pemilih dalam Pemilu. Pertama, partai politik harus menjadikan pemilih sebagai subjek. Partai politik menyadari bahwa konstituen dan masyarakat memiliki derajat kebebasan yang tinggi untuk menentukan pilihan mereka, termasuk pilihan mendukung atau tidak

mendukung dan keputusan untuk tetap atau keluar dari keanggotaan suatu partai politik. Kemudian partai politik juga menyadari bahwa masyarakat mendukung atau tidak mendukung akan lebih banyak ditentukan oleh kinerja partai politik yang dipersepsikan oleh konstituen dan masyarakat. Hal ini membawa implikasi bahwa partai politik harus terus menerus tampil dipanggung dan menunjukkan kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa.

Selanjutnya orientasi kebijakan pemecahan masalah dipengaruhi oleh:

a. Media Massa

Bahwa peran media massa dalam membentuk opini tentang suatu isu sangat penting. Mereka harus menggandeng media massa untuk membantu mempromosikan ide dan gagasan tentang pemecahan masalah yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan ketua DPD PKS Kota Padang Budimansyah¹¹, PKS sebagai partai politik melakukan kegiatan atau program kerja yang terencana dan sistematis, meskipun tidak ada momen Pemilu Kada PKS selalu aktif melakukan kegiatan yang berorientasi untuk kemaslahatan umat. Hal tersebut sesuai dengan penuturan Ketua DPD PKS sebagai berikut:

“PKS adalah partai politik yang selalu melakukan program kerja

¹¹Bapak Budimansyah adalah Ketua DPD PKS sewaktu Pemilu Kada Kota Padang, sementara saat ini yang menjadi Ketua DPD PKS Kota Padang adalah Bapak Hadison

yang berorientasi kepada masyarakat sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh PKS selalu bersentuhan dengan masyarakat secara langsung...”

Selanjutnya ketika dalam Pemilu Kada kegiatan atau program kerja yang dilakukan oleh PKS lebih difokuskan kepada penggalangan suara dan pemenangan di dalam Pemilu Kada. Sehingga peran media massa bagi PKS di dalam Pemilu Kada sifatnya adalah hal yang sangat mendukung di dalam penyampaian informasi dan komunikasi di dalam Pemilu Kada kepada kader PKS dan masyarakat secara lebih luas, sebab jauh sebelum Pemilu Kada dilaksanakan sebenarnya PKS sudah melakukan kegiatan dan merealisasikan program kerja langsung kepada masyarakat. Peran media massa membantu progresivitas pencapaian peningkatan dukungan dari konstituen.

Dari gambaran di atas, diketahui bahwa PKS sudah melakukan upaya untuk menempatkan pemilih sebagai subjek meskipun hal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan bahwa pemilih ditempatkan sebagai mitra, maksudnya adalah bahwa masyarakat atau pemilih memiliki rasionalitas dan menginginkan kebutuhan mereka untuk terpenuhi, sehingga dalam mewujudkan kepentingan bersama dua aspek (partai politik dan pemilih) harus bersinergi dan menjadi mitra sejalan.

Sementara itu terkait dengan Pemilu Kada, upaya yang dilakukan PKS dalam segmentasi politik pemilih melalui media massa tidak memiliki strategi khusus artinya penyampaian informasi melalui media massa disampaikan untuk seluruh masya-

rakat umum tidak saja kader PKS atau simpatisan PKS, akhirnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat menjadi berimbang dan dapat diuji kelayakan informasi tersebut. Selanjutnya pihak PKS Kota Padang menilai hal tersebut akan memudahkan sosialisasi pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari koalisi PKS dan PAN.

PAN sebagai partai yang berkoalisi dengan PKS, dari hasil wawancara penulis dengan sekretaris PAN Kota Padang belum melakukan upaya yang intensif seperti PKS, karena menurut penuturan sekretaris PAN Kota Padang di dalam Pemilu baik legislative maupun Pemilu presiden dan Pemilu Kada, yang melakukan peranan penting dalam menggalang dukungan dan penyampaian visi misi kandidat lebih banyak dilakukan oleh kandidat tersebut bersama dengan tim suksesnya, sementara mesin partai tidak berperan signifikan, barangkali kondisi itu dipengaruhi oleh kaderisasi partai yang relative longgar (misalnya pemilihan ketua umum PAN cenderung tidak mengutamakan kader yang jelas kiprah dan tanggung jawabnya terhadap idealism partai namun lebih kepada faktor lain, misalnya: materi, kepentingan dan lain sebagainya) sehingga hal tersebut melemahkan fungsi partai sebagai mesin politik yang sangat besar peranannya di dalam Pemilu.

b. Kinerja Ekonomi dan Tanggungjawab Politik

Kinerja dan tanggungjawab partai politik atau kandidat secara bersamaan mempengaruhi hasil Pemilu. Persoalan ekonomi erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya tanggungjawab politik diartikan sebagai kontribusi partai politik atau kandidat terhadap bangsa dan Negara.

Sebelum membahas kinerja dan tanggungjawab partai politik atau kandidat demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, yang juga harus diperhatikan adalah hubungan dialogis antara partai politik atau kandidat dengan konstituen atau masyarakat. Dialog dilakukan dimaksudkan untuk mencari kesepakatan dengan pihak-pihak yang memiliki pendapat dan kepentingan berbeda. Dialog akan sulit dilaksanakan jika partai politik hanya melihat dan mempertimbangkan kepentingan serta ideologi partainya sendiri, tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat dan sebaliknya. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat dibutuhkan kerangka acuan (*frame of reference*) dan sikap keterbukaan untuk menerima masukan dari berbagai pihak sehingga tercermin bahwa partai politik atau kandidat tersebut peka dan peduli terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat.

Kemudian partai politik dibebani kewajiban sebagai pelayan public, membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui perjuangan ideologi mereka yang tercermin di dalam program kerja dan platform partai. Menjadi pelayan publik berarti keberadaan partai politik adalah untuk melayani kepentingan masyarakat secara luas, bangsa dan Negara. Hal-hal yang akan dilakukan oleh partai politik harus berorientasi pada perbaikan kondisi sosial masyarakat, dan tidak hanya terfokus pada apa yang dirasakan benar oleh partai

politik tersebut. Partai politik harus berkontribusi pada penyelesaian masalah yang dihadapi public sehingga menghasilkan dukungan yang tinggi dari masyarakat terhadap partai politik tersebut. Namun partai yang hanya bertujuan untuk mewujudkan kepentingan mereka tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat akan mengakibatkan penilaian negative dari masyarakat akhirnya dukungan terhadap partai tersebut menurun.

Terkait dengan Pemilu Kada Kota Padang tahun 2008, PKS dan PAN sebagai partai pengusung pasangan Fauzi Bahar-Mahyeldi, dari aspek penyelesaian masalah di dalam masyarakat sebenarnya secara kepartaian sudah dibicarakan di DPRD Kota Padang.

PKS dan PAN sudah bersinergi dalam upaya penyelesaian persoalan masyarakat, namun yang belum tergambar dengan jelas adalah hubungan dialogis antara partai politik dengan konstituen baik PKS maupun PAN, (hal tersebut penulis kroscek kepada salah satu simpatisan PAN pengetahuannya tentang contoh program kerja atau kebijakan PAN dalam penanganan masalah anak terlantar di Kota Padang). Sehingga hubungan dialogis belum tergambar, meskipun di dalam penuturannya baik PKS maupun PAN selalu menyatakan bahwa mereka bersifat terbuka menerima kritik dan saran dari masyarakat termasuk ketika hal yang sama ditanyakan kepada tim sukses dari PAN atau PKS, akan tetapi di dalam realisasinya program kerja dalam penyelesaian masalah masyarakat tidak dirasakan dampak-

nya secara signifikan oleh masyarakat terutama kaum marginal.

Pasangan Fauzi Bahar dan Mahyeldi berjanji akan mensejahterakan masyarakat dari segala aspek kehidupan terutama keagamaan, pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Secara tindakan, baik Fauzi Bahar maupun Mahyeldi adalah orang-orang yang sudah berkiprah (Fauzi Bahar sebagai *incumbent* dan Mahyeldi sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat periode sebelumnya). Jadi di dalam Pemilu Kada, meskipun tidak sempurna sesuai dengan keinginan masyarakat, setidaknya masyarakat sudah mengetahui kiprah mereka berdua dan masyarakat Kota Padang lebih yakin dengan pihak yang sudah terbukti berbuat untuk kepentingan umum sehingga di dalam Pemilu Kada pasangan tersebut memperoleh kemenangan.

Kerangka acuan atau gambaran program kerja yang akan direalisasikan oleh pasangan walikota dan wakil walikota sudah disusun oleh partai pengusung. Khusus untuk PKS mengenai visi misi dan program kerja walikota dan wakil walikota sudah disosialisasikan kepada hampir 90% penduduk Kota Padang (bersifat *door to door*), seperti petikan wawancara dengan tim sukses PKS sebagai berikut:

“pola menyampai visi misi dan program berdasar segmen yang sudah dibagi, misalnya melalui media massa, melalui selebaran kepada petani, nelayan hampir setiap rumah yang ada di kota Padang sudah dimasuki oleh kader PKS, program PKS adalah gerakan peduli kepada masyarakat, ada atau tidak ada pilkada

dan jika ada pilkada maka kegiatannya lebih intensif lagi misalnya waktu gempa menggalang bantuan masyarakat, kegiatan kesehatan gratis....”

Selanjutnya, setelah diketahui komitmen dan kerangka acuan program kerja untuk peningkatan kehidupan ekonomi dan tanggungjawab politik pasangan walikota dan wakil walikota serta partai pengusungnya, yang harus ditelaah adalah kinerja ekonomi dan tanggungjawab politik itu sendiri. Meskipun secara tindakan kolaborasi Fauzi Bahar dan Mahyeldi belum kelihatan, parameter menganalisis kinerja ekonomi dan tanggungjawab politik pasangan tersebut dapat mengacu kepada sepak terjang partai politik pengusung yaitu PKS dan PAN (menurut Tim Sukses). Padahal berdasarkan data BPS pertumbuhan PDRB Kota Padang berdasarkan lapangan usaha mengalami penurunan (lihat table) meskipun Indeks Pembangunan Manusia masuk ke dalam kategori menengah ke atas.

Meskipun indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Padang masuk ke dalam kategori menengah ke atas, aspek ekonomi secara keseluruhan perekonomian masyarakat Kota Padang relative tidak stabil, di antara faktor yang mempengaruhinya adalah gempa bumi tahun 2007 sehingga sector perdagangan dan pariwisata Kota Padang lesu, kemudian aspek kelautan dan pertanian juga terpengaruh oleh hal tersebut, sementara fokus Pemerintah Kota Padang pada pemulihan kondisi masyarakat dan rekonstruksi bangunan dan rumah penduduk yang hancur pasca gempa termasuk relokasi sekolah dan bangunan

pemerintah sehingga aspek ekonomi terus diupayakan oleh Pemerintah Kota Padang.

Pasangan walikota dan wakil walikota bersama partai politik pengusungnya berkomitmen untuk melanjutkan upaya pemulihan perekonomian Kota Padang dengan memberikan kemudahan akses dan pelayanan kepada masyarakat. Secara tanggungjawab politik, meskipun masih terdapat kelemahan dalam kebijakan namun pencitraan tetap dilakukan oleh pasangan tersebut sehingga mampu meningkatkan dukungan ketika Pemilu Kota. Komitmen dan intensivitas sosialisasi dan pencitraan kiprah atau tindakan kepada masyarakat dapat meningkatkan dukungan pemilih kepada kandidat terutama dari segi kinerja ekonomi dan tanggungjawab politik.

c. *Penilaian tentang Policy-Problem-Solving*

Penilaian *ex-post* yaitu menilai apa saja yang telah dilakukan oleh partai politik atau penguasa untuk memperbaiki kondisi yang ada. Sementara *ex-ante* yaitu mengukur dan menilai kemungkinan program kerja dan solusi yang ditawarkan sebuah partai ketika diterapkan untuk memecahkan sebuah persoalan.

Baik atau buruknya penilaian terhadap partai politik terhadap kinerja yang dilakukan dan tawaran solusi permasalahan masyarakat adalah tergantung dari partai politik tersebut. Hal yang harus dilakukan oleh partai politik adalah membuka diri dan menempatkan masyarakat serta konstituen sebagai subjek dan mitra mereka. Oleh sebab itu partai

politik harus mampu menemukan metode dan cara inovatif untuk berinteraksi dengan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Partai politik juga harus melakukan proses pembelajaran. Masyarakat luas juga harus dibiasakan untuk lebih berekspresi terhadap kepuasan dan ketidakpuasan mereka atas kebijakan.

Sementara itu LSM juga semakin dituntut untuk belajar menempatkan diri mereka di tengah-tengah antara hubungan partai politik, masyarakat dan pemerintah. LSM dikenal berperan penting dalam mengedukasi politik dan menjalankan fungsi kontrol interaksi politik dalam masyarakat. Kemudian Negara dan aparatnya harus belajar mengelola interaksi politik antara partai politik dan masyarakat. Negara — birokrasi harus bersifat netral jauh dari intervensi partai politik tertentu, karena kepentingan Negara adalah kepentingan nasional bukan kepentingan kelompok. Sehingga *ex post* dan *ex ante* dapat dinilai secara proporsional.

Terkait dengan Pemilu Kota Padang, segmentasi politik pemilih yang dilakukan oleh partai pengusung terhadap penilaian dan tawaran solusi kebijakan untuk masyarakat umum dilakukan dengan menggandeng semua elemen masyarakat misalnya melalui forum diskusi umum atau melalui fraksi di DPRD Kota Padang atau melalui pemerintah Kota Padang, jadi masyarakat dapat menganalisis dan menilai kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah dan DPRD. Berikut penuturan tim sukses PKS:

“PKS melakukan pada semua aspek; kelembagaan DPRD Kota Padang, keberpihakan kepada masyarakat, kebutuhan masyarakat baik dalam sikap politik (pandangan fraksi, keputusan di DPRD: terkait dengan pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan sikap politik lainnya misalnya melalui anggaran...”

Dari wawancara tersebut diketahui bahwa PKS dan pasangan kepala daerah saling bersinergi membangun kepentingan masyarakat melalui kebijakan dan solusi terhadap permasalahan masyarakat, begitu juga ketika dikonfirmasi kepada tim sukses dari PAN, bahwa di dalam visi misi PAN juga mengutamakan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya konsistensi partai pengusung (PKS) dikatakan juga sebagai representasi komitmen pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, seperti kutipan wawancara berikut:

“Sikap konsisten PKS dianggap juga sebagai representasi kandidat dari PKS, jadi cerminan PKS yang selama ini pro rakyat—dibuktikan melalui perbuatan dan perkataan (menyeimbangkan sikap politik dengan sikap resmi partai—kepedulian setiap waktu, kegiatan rutin dengan masyarakat) dan dikelola oleh DPRA, DPC, DPD, DPW”

d. *Position*

Mengacu kepada sejauh mana pemilih menilai kedekatan pendapatnya dengan kebijakan yang akan dilakukan atau ditawarkan oleh seorang kandidat atau partai politik.

Pemilih dalam Pemilu terbagi atas beberapa tipe pemilih yang didasarkan atas pertimbangan yaitu orientasi *policy-problem-solving* dan orientasi ideology, di antaranya adalah: pemilih rasional; pemilih kritis; pemilih skeptic; pemilih tradisional.

Terkait dengan *position* sebagai salah satu aspek untuk menganalisis segmentasi politik pemilih dalam Pemilu Kota Padang, bahwa konfigurasi pemilih tidak bisa dipisahkan dari aspirasi atau bentuk kebijakan yang diinginkan oleh pemilih terhadap partai politik atau kandidat pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh sebab itu PKS dan PAN beserta tim sukses pemenangan pasangan Fauzi Bahar dan Mahyeldi dalam hal itu telah berupaya untuk melakukan pendekatan kepada pemilih dan menawarkan program kerja dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, hal tersebut sesuai dengan kutipan wawancara dengan ketua DPD PKS:

“Untuk menunjang peningkatan perolehan suara dan besarnya perhatian masyarakat, sejak jauh-jauh hari tim dari PKS terutama tim internal turun ke lapangan untuk menyebarkan informasi tentang visi misi dan booklet Fauzi Bahar...”

Dari kutipan di atas diketahui bahwa partai politik pengusung Fauzi Bahar dan Mahyeldi sudah melakukan upaya untuk melakukan pendekatan kepada pemilih dan menjelaskan visi dan misi mereka. Hal tersebut dibenarkan oleh beberapa pihak yang penulis mintai keterangan terkait penyebaran informasi melalui booklet dan pertemuan-pertemuan lain yang dilakukan oleh

tim sukses pasangan Fauzi Bahar dan Mahyeldi tersebut.

Secara keseluruhan partai politik membutuhkan suatu perencanaan strategis dalam melakukan hubungan dengan masyarakat. Perencanaan ini menyangkut produk politik yang akan dibawakan, image yang akan dimunculkan, program kampanye yang akan dilakukan dan strategi penggalangan massanya. Perencanaan yang dilakukan oleh partai politik atau kandidat akan sangat membantu masyarakat dalam menangkap pesan-pesan politik di balik aktivitas partai yang beragam (seperti *talk show*, kunjungan ke lapangan, kritik terhadap pemerintah solusi yang ditawarkan dan lainnya).

2. Orientasi Ideologi

Ideologi melingkupi sebuah sistem nilai, keyakinan, simbol, mitos, ritual dan jargon yang terdapat dalam suatu struktur social masyarakat. Dalam politik hubungan antara ideology dengan politik adalah hubungan yang tidak terpisahkan, bahwa partai politik menyiratkan suatu cara berpikir yang mewarnai dan mempengaruhi cara bersikap dan berperilaku yang diperlihatkan orang-orang dalam suatu kelompok sosial. Diantara aspek yang harus diperhatikan dalam orientasi ideologi dalam segmentasi politik pemilih adalah:

Metode dan Tujuan Akhir

Antara satu ideologi dengan ideologi yang lain memiliki cara dan tujuan akhir yang berbeda. Struktur ideologi pemilih sangat menentukan partai apa dan kontestan seperti apa yang menurut mereka akan menyuarakan

mereka. Fenomena kedekatan pemilih dengan ideologi partai politik dapat dilihat melalui model '*spatial down*', dimana pemilih diasumsikan sebagai '*risk averse*' dan mereka memiliki system nilai serta keyakinan yang sudah tertanam. Pemilih akan memilih partai politik yang memiliki kesamaan ideologi dengan mereka.

Menurut Gidden¹² ideologi dianggap sebagai faktor utama bagi pemilih dalam menentukan partai yang akan dipilih dan sekaligus bisa berevolusi seiring dengan perjalanan waktu. Dalam Pemilu atau Pemilu Kada kecenderungan kedekatan konstituen dengan ideologi suatu partai politik tertentu di mobilisasi dengan baik oleh partai politik yang bersangkutan dengan mengarahkan massa sehingga memperkuat identitas massa melalui ritual simbolik politik seperti rapat akbar dan memperluas identitas ideologi partai ke massa mengambang dan partisan partai lain, melalui efek komunikasi dari pertemuan rapat akbar atau liputan media. Implikasinya akan mempermudah pemilih untuk mengidentifikasi ideologi suatu partai sekaligus mengundang perhatian dari partisan partai lain.

Beralih pada kondisi riil di Indonesia dan khususnya pada Pemilu Kada Kota Padang 2008, pendekatan ideologi yang mengacu pada metode dan tujuan akhir sudah dimanfaatkan oleh partai pengusung kandidat walikota dan wakil walikota, kondisi sosial masyarakat Kota Padang yang cukup religius Islam dan nasionalis digarap maksimal oleh partai

¹² Dalam Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo

pengusung, meskipun secara nyata juga diakui bahwa ideologi tidak lagi menjadi parameter mutlak di dalam memilih partai politik atau kandidat di Indonesia secara umum. Di Indonesia ideologi hanya sebagai jargon terbukti beberapa partai di Indonesia memiliki kesamaan ideologi namun basis massa yang berbeda atau persoalan lain yang menyebabkan mereka tidak bersatu (contoh PAN dengan PKB dan PKS dengan PBB, dan lain-lain).

PKS sebagaimana diketahui adalah partai yang memiliki massa besar dan hal tersebut merata hampir di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki penduduk mayoritas Islam. Kondisi tersebut adalah modal awal bagi PKS sekaligus PAN di Kota Padang karena diasumsikan bahwa PAN yang memiliki basis Muhammadiyah juga memiliki simpatisan dengan jumlah besar, sehingga di dalam Pemilu Kota Padang, metode dan tujuan akhir ideologi bagi PKS dan PAN bukan hal yang relative rumit. Selanjutnya kondisi tersebut juga didukung oleh kandidat (Fauzi Bahar dan Mahyeldi) yang sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Kota Padang sehingga di dalam segmentasi politik pemilih pada orientasi ideologi relatif tidak sulit untuk dilakukan, hal ini sesuai dengan penuturan ketua DPD PKS Kota Padang:

“PKS partai terbuka, lahir untuk bangsa Indonesia dan siap diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, semua pihak berpeluang untuk bergabung dengan PKS, terkait dengan ideologi bahwa semua masyarakat hidup di bawah naungan Islam yang baik karena Islam juga agama yang toleran...”

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa PKS memberikan peluang kepada semua pihak untuk bergabung dan terlibat dengan kegiatan PKS, karena ideologi politik PKS membuka peluang bagi semua pihak untuk bergabung dengan PKS selama memiliki komitmen dan perjuangan yang sama dengan PKS untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang *rahmatan lil alamanin*.

PKS saat ini juga sudah melangkah pada posisi tengah pergerakan partai politik di Indonesia, PKS telah mengakomodasi kader dari kalangan nasionalis dan non Islam yang terpenting bahwa *plat form* perjuangan pihak yang bergabung dan berkoalisi dengan PKS tetap konsisten sesuai dengan visi dan misi PKS.

“PKS partai terbuka, semua orang dapat bergabung dan mengikuti aktivitas PKS dan mengenal PKS secara terbuka, cuma untuk menjadi anggota PKS atau anggota DPR Dari PKS butuh proses kaderisasi yang panjang (6 tingkat) — pemula, muda, madya, dewasa, ahli, purna dan semua itu dinilai oleh struktur...”

Penjelasan PKS termasuk juga PAN kepada pemilih tentang visi misi partai mereka sekaligus sosialisasi visi misi dan program kerja Fauzi Bahar dan Mahyeldi, menjadikan Fauzi Bahar dan Mahyeldi dinilai sebagai pasangan walikota dan wakil walikota yang memiliki ideologi dan *plat form* yang jelas dan diterima oleh pemilih.

Struktur Ideologi Spatial

Struktur ideologi pemilih sangat menentukan partai atau kandidat

seperti apa yang menurut mereka akan menyuarakan mereka. Jadi hal tersebut dapat dipengaruhi oleh sistem partai di suatu negara kemudian juga kedekatan ideologi antara pemilih dengan partai politik atau kandidat — pemilih telah memiliki sistem serta keyakinan yang sudah tertanam.

Indonesia adalah Negara yang menganut system multi partai, system tersebut membuat partai politik tumbuh subur di Indonesia, walaupun sebenarnya di antara sejumlah partai politik tersebut memiliki kecenderungan kesamaan ideologi. Sejumlah partai politik di Indonesia ada yang memiliki massa yang solid dan konsisten namun sebagian partai politik hanya mengharapkan *floating mass* atau massa mengambang sehingga hal tersebut juga mempengaruhi kedekatan ideologi dengan pemilih suatu partai politik. Berbeda dengan di Negara lain, partai politik yang berbeda relatif memiliki ideologi partai yang berbeda pula sehingga massa partai tersebut jelas berpihak kemana dan meyakini ideologi tertentu. Di Indonesia konsep keyakinan terhadap ideologi perlu dibuktikan lebih jauh karena setiap Pemilu atau Pemilu Kada konsistensi pemilih sulit diharapkan, meskipun ideologi bukan hal mutlak di samping orientasi *policy-problem-solving*, ideologi diharapkan sebagai pijakan awal dan seharusnya menjadi acuan berpikir dan dan bertindak haluan partai politik sehingga plat form sebuah partai politik menjadi kuat.

Bukannya tidak ada partai politik yang berupaya menjadikan ideologi sebagai landasan awal di Indonesia namun jumlahnya belum sebanding dengan jumlah partai di

Indonesia, PKS adalah salah satu partai politik yang cukup mampu untuk menjadikan ideologi sebagai faktor yang menentukan arah kebijakan partai. PKS awalnya adalah partai yang memiliki ideologi Islam, saat ini PKS lebih moderat dengan ideologi nasionalis-Islam, hal ini sejalan dengan visi misi PKS bahwa PKS adalah partai terbuka dan mengajak semua pihak untuk bergabung selagi sejalan *plat form* PKS, pernyataan ini didukung oleh hasil wawancara penulis dengan ketua DPD PKS Kota Padang:

“PKS adalah partai nasionalis-Islam, AD/ART dan platform pks, tentang konsep-konsep pembangunan Indonesia sampai 2025--Indonesia modern 2025 (+600 hlm) menjelaskan visi, misi, agenda PKS dari waktu ke waktu, memberikan contoh langsung kepada masyarakat bahwa politik PKS santun dan bermoral serta religious--Islam rahmatan lil alamin-substansial....

Dari kutipan di atas diketahui bahwa PKS lebih moderat dan terbuka bagi semua pihak dan hal inilah yang membuat PKS relevan untuk berkoalisi dengan partai-partai politik lain termasuk dengan koalisi PKS-PAN dalam Pemilu Kada Kota Padang tahun 2008. PKS dan PAN sebagaimana pernyataan ketua DPS PKS Kota Padang adalah partai yang dilahirkan sama yaitu pada era reformasi dan bertujuan sama yaitu mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Sehingga ideologi spatial pemilih dapat diakomodasi dengan baik dalam Pemilu Kada Kota Padang.

Efek Komunikasi

Terdapat dialektika antara ideologi pemilih dengan partai politik atau kandidat. Hal tersebut tidak terlepas dari efek komunikasi¹³. Partai politik atau kandidat menggunakan strategi mobilisasi massa, media yang berimplikasi memperkuat identitas massa melalui ritual politik simbolik dan memperluas identitas ideologi partai kepada massa mengambang dan partisan partai lain.

Proses mobilisasi massa adalah cara yang sudah lama digunakan dalam meningkatkan dukungan dan simpatik dari pemilih. Ritual politik yang bersifat simbolis melalui rapat akbar atau aksi lain yang didengungkan atas nama kepentingan rakyat selalu diminati dan dijadikan komoditas oleh media massa sehingga berpengaruh terhadap pihak lain dan menjadi tertarik untuk terlibat dalam kegiatan tersebut.

Sebenarnya tidak semua partai politik dapat melakukan *floating mass*, hal tersebut dipengaruhi pemahaman ideologi yang diterima oleh pemilih atau simpatisan. Efek ini kemudian semakin berkembang kepada kebijakan bagi kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan garis ideologi dan aspirasi dari pemilih atau simpatisan.

Pemilu Kada Kota Padang tidak terlepas dari faktor komunikasi politik ini. Ritualisasi politik yang bersifat simbolik selalu dieksplorasi oleh media sehingga menimbulkan dampak bagi pada penilaian pemilih dan atau partisan dari kelompok lain. PKS sebagai partai yang dikenal dengan simpatisan fanatik dalam pertemuan

akbar selalu dihadiri oleh massa yang besar sehingga animo pihak lain juga terpacu untuk mengetahui kegiatan apa yang dilakukan oleh PKS dan juga kegiatan dengan koalisinya(PAN) dalam Pemilu Kada. Kondisi ini memudahkan PKS dan PAN beserta pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mensosialisasikan program kerja dan mendapatkan keuntungan dari masyarakat luas karena juga dibantu oleh ekspos media massa, seperti penuturan berikut ini:

“PKS melakukan kegiatan di tempat umum itu diketahui oleh banyak pihak karena memang kita tujuannya adalah untuk sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat, terkadang diliput media dan diekspos juga di Koran misalnya pengobatan gratis...”

Kebebasan berekspresi dan pemberitaan adalah salah satu ciri masyarakat kontemporer dewasa ini. Pendekatan komunikasi politik tidak dapat lagi menggunakan cara-cara lama. Eksploitasi dan manipulasi berlebihan mengenai suatu peristiwa dalam masyarakat dengan mudah dideteksi dan diberitakan oleh media massa. Masyarakat juga semakin banyak mendapatkan alternative sumber informasi. Salah satu implikasinya adalah perkembangan isu politik yang cukup dinamis.

V. PENUTUP

Segmentasi politik merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh partai politik atau kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk memenangkan perolehan suara dalam Pemilu dan Pemilu Kada. Segmentasi Politik dapat dilakukan dengan

¹³ Dalam Firmanzah, 2008. *Op cit*.

beberapa metode atau teknik dan di antara metode tersebut, metode yang cukup relevan untuk menganalisis segmentasi politik pemilih dalam Pemilu atau Pemilu Kada adalah melalui segmentasi sebab akibat yaitu mengelompokkan masyarakat berdasarkan perilaku yang muncul dari isu-isu politik. Metode sebab akibat ini melandaskan metode pengelompokan berdasarkan pemilih rasional, tradisional, kritis dan pemilih mendua disamping itu juga melihat orientasi ideologi partai politik atau kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah

Pemilu Kada Kota Padang tahun 2008 dimenangkan oleh pasangan Fauzi bahar dan Mahyeldi yang diusung koalisi PAN-PKS. Namun dalam proses kemenangan tersebut tidak dipungkiri terdapat kelemahan di antaranya bahwa PAN tidak terlalu melakukan proses kemenangan seperti PKS karena mekanisme di dalam PAN tidak mutlak mengharuskan usaha kemenangan dilakukan oleh partai, jika kandidat memiliki mekanisme tersendiri dan hal itu tidak menyalahi AD ART PAN diberikan keleluasaan. Berbeda dengan PAN, PKS sangat intens dalam proses kemenangan Pemilu Kada Kota Padang, semua aspek dan sumber daya dikelola dengan maksimal untuk memperoleh dukungan suara maksimal dari masyarakat Kota Padang

Segmentasi politik pemilih dengan metode sebab akibat di antaranya dilakukan dengan metode *policy-problem-solving*, yaitu Pemilih menaruh perhatian yang sangat tinggi terhadap partai politik atau kandidat dalam menawarkan solusi sebuah

permasalahan, *policy-problem-solving* ini dapat dilihat dari 3 hal yaitu: media massa, kinerja ekonomi dan tanggungjawab politik, penilaian terhadap *policy-problem-solving* dan position.

Dalam Pemilu Kada Kota Padang aspek media massa sudah dimaksimalkan oleh tim sukses Fauzi Bahar dan Mahyeldi, sebelum menggunakan media massa sebagai saluran komunikasi dan sosialisasi, tim sukses pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk struktur kepengurusan sudah melakukan kegiatan rutin turun ke masyarakat, baik kegiatan sosialisasi maupun kegiatan social lainnya, sehingga mendekati Pemilu Kada intensitas penyampaian informasi melalui saluran media massa lebih ditingkatkan dari pada waktu sebelumnya.

Selanjutnya kinerja ekonomi dan tanggungjawab politik dilakukan melalui pembicaraan mekanisme partai yang disesuaikan dengan *platform* masing-masing partai kemudian disinergikan dengan kepentingan masyarakat umum. Namun data di lapangan ide dan program yang ditawarkan tersebut belum sepenuhnya dapat mengatasi persoalan masyarakat terutama kaum marginal (misalnya tingginya tingkat inflasi, dan lain sebagainya). Secara tanggungjawab politik, meskipun masih terdapat kelemahan dalam kebijakan namun pencitraan tetap dilakukan oleh pasangan tersebut sehingga mampu meningkatkan dukungan ketika Pemilu Kada.

Selanjutnya segmentasi orientasi ideologi terdiri dari metode dan tujuan akhir, ideologi spatial dan efek

komunikasi. Semua aspek tersebut saling terkait namun poin pentingnya bahwa PKS dan PAN dalam Pemilu Kada Kota Padang mampu menggunakan orientasi ideologi dengan baik dibandingkan dengan

calon yang lain, dengan menggarap simpatisan yang solid dari PKS dan sosialisasi yang intens kepada masyarakat dengan pola komunikasi terencana dapat meningkatkan dukungan suara dalam Pemilu Kada

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Duroruddin Mashad. 2004. *Andai Aku Jadi Presiden*. Jakarta: Khalifa.
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Firmanzah. 2010. *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lyman Tower Sargent. 1987. *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer Sebuah Analisis Komparatif*. Jakarta: Erlangga.
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Syaukani, dkk. 2004. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

